PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Studi Kasus di Kabupaten Raja Ampat)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

NOBY STILLES NUMBERI

09522122

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di dapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	17 Oktober 2016
Jam	:	12:00 WIB
Tempat	:	Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama :	**Tanda Tangan**
Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si **Ketua/Penguji/Pembimbing**	.....
Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE. M.Si **Penguji Samping I**	.....
Drs. Suharyanto, MM **Penguji Samping II**	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1)

Gregorius Sahdan, S.IP, MA

HALAMAN MOTTO

“Musuh yang paling berhaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Penulis)

“Selalu ada yang pantas untuk di perjuangkan dan keyakinan yang kuat dapat menjawab semuanya”

(Penulis)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis in saya persembahkan kepada

- Allah Bapa, Putra , dan Roh Kudus yang selalu memberikan hembusan nafas di setiap langkah hidup saya.
- Kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas segala kesabaran dan dukungan yang diberikan tanpa henti.
- Adik tersayang yang selalu menanti kepulangan kaka tercinta.
- Almarhuma Karolina P. Numberi yang selalu menasehati saya.
- Seluruh keluarga besar Numberi-Regoy di Papua.
- Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
- Gregorius Sahdan, S.IP,MA sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Untuk tersayang berinisial “SK” yang selalu memotivasi saya.
- Teman-teman kuliah angkatan 2009
- Anak-anak kos 73, Bung Uldan, Bung Imam. S, Bung Thoby, Bung Ari, Bung Gaspar, Bung Billy, Bung Thomy, Bung Marinus, Dan Jhon Undagi di “DPR” Sapen yang selalu berjuang bersama.
- Untuk Sabum, Sabum Nim, dan seluruh anggota UKM Taekwondo Dojang APMD.
- Seluruh anggota Skywalkers Yogyakarta Tricking Community.
- Seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam suka dan duka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ***"PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH"*** sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan, baik materi dan susuanan bahasa, oleh karena itu penulis sangat menghargai dan berterimakasih bila ada kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dan penulis menerimanya dengan hati yang terbuka untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan pihak lain, tulisan ini tidak akan di selesaikan dengan baik sehingga penulis ingin menyatakan terima kasih kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.sos, M.Si Selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP,MA Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi kuliah.
5. Seluruh Staf dan Karyawan/I STPMD "APMD" Yogyakarta.

6. Seluruh Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang Penulis teliti.
7. Sluruh Keluarga Saya yang saya cintai dan sayangi, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
8. Seluruh Civitas Akademik STPMD “APMD” Yogyakarta.

Yogyakarta, Oktober 2016

Penulis

(Noby Stilles Numberi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ……..... ii

MOTTO..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL ……..... ix

DAFTAR GAMBAR…….. xi

SINOPSIS…….. xii

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang Masalah……. 1
B. Rumusan Masalah…….. 9
C. Tujuan Penelitian…… 9
D. Manfaat Penelitian…… 9
E. Kerangka Konsep…….. 10
F. Ruang Lingkup Penelitian…….. 39
G. Metode Penelitian…… 39
H. Teknik Analisis Data…… 44

BAB II PROFIL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN RAJA AMPAT…… 46

A. Profil Kabupaten Raja Ampat…….. 46
B. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Raja Ampat…… 50
C. Potensi Wisata Raja Ampat……. 60

D. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Raja Ampat…….. 63
E. Target Pajak dan Retrubusi serta Realisasi Penerimaan Sektor Pariwisata……. 64

BAB III ANALISIS DATA……. 66

A. Diskripsi Informan…… 66
B. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah…….. 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN…….. 81

A. Kesimpulan…….. 81
B. Saran……. 82

DAFTAR PUSTAKA…… 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Identitas Informan…….. 41

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Raja Ampat Menurut Umur dan Jenis Kelamin …….. 47

Tabel 2.2.Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi Ke-1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat…… 53

Tabel 2.3. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi Ke-2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat……. 53

Tabel 2.4. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Misi Ke-3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat……. 54

Tabel 2.5. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016…… 58

Tabel 2.6. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2016……. 59

Tabel 2.7. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Menurut Jabatan Esselon dan Staf Tahun 2016…….. 60

Tabel 2.8. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013-2015…… 64

Tabel 2.9. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013-2015……. 64

Tabel 3.1. Informan Berdasarkan Umur…… 67

Tabel 3.2. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin…… 67

Tabel 3.3. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan…… 68

Tabel 3.4. Informan Berdasarkan Pekerjaan…….. 68

Tabel 3.5. Daftar Informan Menurut Unit Kerja…… 69

Tabel 3.6. Pendapatan Sektor Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013 – 2015…… 79

Tabel 3.7. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Pada PAD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013-2015…….. 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016……..... 55

SINOPSIS

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diberi kewenangan otonom dalam pengambilan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerahnya. Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan wisata alam yang sangat menarik bagi wisatawan sangat berpotensi bagi pemerintahan daerah Kabupaten Raja Ampat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini Pajak dan Retribusi kawasan wisata. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bahwa sumber PAD diantaranya berasal dari hasil pajak dan retribusi daerah termasuk didalamnya sektor pariwisata. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi sektor pariwisata, maka dibutuhkan suatu pengelolaan yang tepat oleh pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Rumusan masalah skripsi ini adalah "Bagaimana Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pedapatan Asli Daerah" khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Dengan suatu harapan bahwa setelah diketahui pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan hasil pajak dan retribusi sektor wisata Bahari untuk menigkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat diambil suatu tindakan yang lebih baik dan tepat dalam pengelolaan pajak dan retribusi sektor pariwisata agar dapat meningkatkan PAD selanjutnya.

Disini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif, berusaha mengambil kesimpulan berdasarkan penilaian atas berbagai data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Selain itu dalam melakukan penelitian penulis menentukan subyeknya adalah pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata, pegawai Uptd Badan Pelayanan Umum Daerah, pelaku usaha (swasta) di Kabupaten Raja Ampat. Informan yang diambil sebanyak 7 orang yang terdiri dari 3 orang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2 orang BLUD, dan 2 orang pelaku usaha(swasta) yang berada di Kabupaten Raja Ampat.

Setelah penulis melakukan pengolahan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan pertama: Pencanaan pengelolaan pariwisata menggunakan strategi pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai program kerja. Kedua: Pengorganisasian dalam rangka pengelolaan pariwisata dilakukan baik dalam bentuk institusi dan kelompok yang berdasarkan hak milik setiap kawasan. Ketiga: Pengarahan dalam rangka pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) lebih terkait penyadaran masyarakat dan pihak swasta untuk menjaga, melestarikan,dan mengelola sumber daya alam yang ada didaerah secara maksimal, efektif dan efisien guna membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Keempat: Pengordinasian dalam rangka pengelolaan pariwisata dilakukan bersama dengan dinas, institusi, masyarakat, dan swasta dalam bentuk kerjasama yang belum berjalan dengan baik terutama antara dinas kebudayaan dan pariwisata dengan masyarakat dan swasta (pelaku usaha). Kelima: Pengontrolan dalam rangka pengelolaan pariwisata yang dilakukan pemerintah (dinas kebudayaan dan pariwisata) belum maksimal terutama

dalam hal jalur trans wisata. Keenam: Bahwa pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah meskipun masih bersifat fluktuatif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pusat untuk memberikan prioritas pembangunan di wilayah Papua Barat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tetang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat, memberi suatu kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Sejak diberlakunya kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Khususnya diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nommor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang terbaru Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mengakibatkan banyak sekali perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan rakyat setempat dalama sistem Negara Kesatuan Repulik Indonesia. (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 6).

Pembangunan pariwisata memiliki peran signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata mengkontribusi devisa dari kunjungan wisatawan manca negara (wisman) dan Produk Domestik Bruto (PDB)

beserta komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jati diri bangsa.

Dalam aspek lingkungan, pariwisata khususnya ekowisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional. Pembangunan sektor pariwisata dan penunjangnya memiliki makna penting dalam integrasi nasional. Infrastruktur bukan saja berfungsi mengikat geografi wilayah nusantara, tetapi juga memandu lahirnya partisipasi, efisiensi dan kesejahteraan. (Iwan Nugroho, 2015 : 1).

Pariwisata merupakan fenomena multidisplin dan multisektoral yang sangat kompleks tidak saja berupa fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena geografi, politik, sosial dan budaya. Dalam upaya pembangunan di bidang pariwisata, perlu diingat bahwa kegiatan Pariwisata merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling mengkait, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam suatu kegiatan kepariwisataan.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengembangan sumber daya alam adalah hak-hak akses atas sumberdaya alam dari sudut pandang masyarakat. Resistensi tidak hanya muncul dari golongan muda untuk tujuan modernisasi, akan tetapi juga diperburuk oleh ketidakpedulian orang yang berasal dari luar Raja Ampat untuk mengeksploitasi sumberdaya tanpa izin atau konpensasi dengan oknum-oknum pihak berewenang. Untuk itu pemerintah daerah bersama *stakeholder*s perlu memahami dan menyepakati. (Atiyah Oemie, 2010. *Jurnal Raja Ampat*)

Pariwisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri, maka daerah juga diperbolehkan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang lain yang dapat membantu memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diberi kewenangan otonom dalam pengambilan kebijakan yang relevan dengan kondisi objektif dan karakteristik wilayah di masing-masing daerahnya yang memiliki potensi sumber daya alam dan dioptimalkan secara efektif dan efisien untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian alam.

Sesuai dengan kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah berwenang menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi objektif dan karakteristik wilayahnya terhadap potensi SDA yang tersedia untuk dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kelautan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan genetika ikan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat. (Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008, tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat).

Kontribusi Pendapatan Asli Daeah sangat penting karena menyangkut pelayanan atas tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan daerah otonom dalam

menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan pelayanan umum bagi masyarakat daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Seiring dengan kebijakan desentralisasi program pembangunan nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan untuk merencanakan dan memutuskan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kemampuan dan aspirasi masyarakat daerah. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah otonom melaksanakan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan antara lain pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuh-kembangkan kepariwisataan serta menggali sektor potensial untuk pembangunan serta mencukupi kebutuhan daerah dengan disesuaikan beban tugas yang berkembang saat ini.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan yang menjual produk adalah pemerintah Kabupaten Raja Ampat sehingga Dinas Pariwisata dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan daerah di bidang kepariwisataan dalam otonomi daerah. (Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat).

Kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat menjadi kawasan wisata alam yang sangat menarik untuk dijadikan tujuan wisata, serta berpotensi positif bagi pemerintahan daerah Kabupaten Raja Ampat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui skema Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini Pajak dan Retribusi kawasan wisata.

Tentu saja untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan satu kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan berbagai potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut penulis bahwa skema kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pajak dan retibusi, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bagi lingkungan serta bagi pemerintah daerah.

Potensi sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat mempunyai peluang yang besar, prospektif untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan pariwisata di daerah lain bahkan mancanegara. Kabupaten Raja Ampat mempunyai obyek wisata yang sangat beragam, akan tetapi pembagian pengelolaan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat belum terlihat merata, khususnya untuk kawasan bahari (wisata alam), dimana untuk saat ini dalam pengelolaannya masih belum optimal, walaupun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sudah membangun fasilitas dan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut, antara lain jembatan, penginapan, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya, tetapi pengelolaan yang ada masih belum terlihat jelas.

Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu bentuk metode pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Raja Ampat, terutama pada sumber daya alam (bahari)

sektor pariwisata karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat kawasan wisata tersebut secara langsung. Namun dalam proses pengelolaan dan pembangunan (wisata) wilayah bahari, pasti akan menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan di wilayah pesisir bahari, semakin tinggi pula pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan hidupnya.

Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dan keterpaduan dalam pemanfaatan wilayah bahari sebagai obyek wisata, maka diperlukan suatu rencana pengelolaan yang mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk merencanakan pengelolaan wisata alam bahari dengan baik, maka masyarakat di sekitar wilayah tersebut dan instansi yang terkait *(stakeholders)* juga perlu dilibatkan di dalamnya.

Jika dilihat dari tingkat pendapatan (pemasukan) dari obyek wisata bahari kabupaten Raja Ampat, berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat 1 tahun terakhir, terlihat sejak Januari 2013 sampai Desember 2015, mengalami grafik naik turun dari jumlah kunjungan dan pemasukan. Berikut jumlah pemasukan keuangan sektor pariwisata atau wisata bahari pada tahun: 2013 (1) Rp4.925.942.150; (2) tahun 2014 Rp 5.640.580.817; (3) tahun 2015 Rp4.522.213.352. Berdasarkan data tersebut, setidaknya memberikan gambaran tentang pendapatan obyek wisata bahari Kabupaten Raja Ampat selama 3 tahun belakangan. Dari hasil pendapatan pajak dan retribusi sektor pariwisata dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan pendapatan di tahun 2015 sekitar 19,8% dari hasil tahun sebelumnya.

Berdasarkan informasi lapangan menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebabnya, antar lain : menurunnya kunjungan wisatawan karena loket pembayaran

PIN/karcis wisata tidak berada di lokasi wisata, biaya wisata yang sangat tinggi, dan penyediaan infrastruktur tambahan (penginapan/hotel, transportasi, bandara, dll) yang masih belum optimal. Sedangkan pada aspek masyarakat, menurut data lapangan menunjukan bahwa belum terintegrasinya pegelolaan wisata bahari dengan masyarakat baik dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi.

Namun di balik semua usaha pemerintah dalam mengembangkan ekonomi di bidang pariwisata atau wisata bahari untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, masih banyak terdapat ketidakjelasan sumber Pendapatan Asli Daerah secara khusus di bidang pajak adan retribusi sektor pariwisata. Banyak sekali wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Raja Ampat dengan membayar pin atau karcis masuk tempat wisata yang tidak diketahui secara jelas pemasukannya secara legal atau ilegal, sebab dilihat dari presentasi jumlah wisatawan yang datang dan membayar karcis atau pin masuk tempat wisata, lebih banyak yang membayar di luar dari loket masuk wisata atau di luar dari Kabupaten Raja Ampat itu sendiri. Adapun banyak masyarakat lokal atau yang datang dari luar yang mengeluh tentang biaya rekreasi atau wisata yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Ini yang menjadikan banyak wisatawan lokal dan manca negara mempertimbangkan untuk berwisata di Kabupaten Raja Ampat karena biaya yang mahal dan faktor-faktor diatas yang merugikan setiap wisatawan dan dampaknya sangat jelas kepada pendapatan pariwisata dan PAD Kabupaten Raja Ampat.

Padahal pada sisi lain, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam dokumen Rencana Strategi (renstra) memasukan unsur sektor pariwisata sebagai salah satu

sumber pendapatan asli daerah. Artinya bahwa perlu ada akselerasi antara Renstra Daerah dengan strategi pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber alternatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui formulasi PAD.

Maka dengan adanya pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat menambah pendapatan daerahnya. Disamping itu Pemerintah Daerah juga berupaya untuk dapat menyerap tenaga kerja. Demikian pula dengan pengembangan obyek wisata Bahari diharapkan dapat menjadikan daerah itu semakin banyak arus wisatawan yang datang dan semakin ramai. Sehingga masyarakat sekitarnya dapat membuka usaha guna menambah penghasilan, misalnya dengan membuka warung makan, penginapan, industri kerajinan, tempat parkir. Keadaan demikian dapat memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Adapun wisata Bahari bisa menjadi seperti sekarang ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten Badan Pengelola Obyek Wisata, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Propinsi Papua Barat, serta dukungan dari masyarakat sekitarnya, sehingga wisata Bahari menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pedapatan Asli Daerah* ", di Kabupaten Raja Ampat. Sehingga obyek wisata Bahari menjadi obyek tujuan wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

C, Goendang. 1982. *Garis-garis Ilmu Keungan Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Faisol. 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Malang : YA3.

G.,Soekadijo, R. 2013. *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Lingkage.* Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Hadi, Sutriso. 1982. *Metodologi Research Jilid I.* Yogyakarta : Andi Offset.

Ichsan,Much dan Ratih Nur Pratiwi. 1989. *Pokok – pokok Administrasi Keuangan Daerah*. Malang : FIA Universitas Brawijaya.

Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktir yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karyono, Hari. 1997. *Tentang Kepariwisataan.* Jakarta : Grasindo.

M., Manullang. 1981, *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta : Gadja Mada University Perss.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : ANDI.

Moloeng, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Iwan. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pendit, Nyoman S. 1990. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradaya Paramita.

Reksopoetranto, Soemardi. 1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Sonhadji K.H., A. 1994. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Malang : Kalimasahada Press.

Supriyanto, Budi. 2009. *Tentang Manajemen Pemerintahan.* Jakarta :Media Brilian.

Surachman, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung :Pustaka Setia.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Tentang Dasar-Dasar Pariwisata.* Yogyakarta : Penertbit ANDI.